

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi menurut (Ashari, 2022) adalah lokasi pengambilan keputusan yang akan berdampak pada sesuatu. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan suatu sebab atau akibat, yang dapat berupa kebijakan lembaga pemerintah, peraturan, putusan pengadilan, atau peraturan perundang-undangan.

Implementasi menurut (Setiawan et al., 2021) Implementasi merupakan suatu langkah dalam proses pembuatan kebijakan publik. Umumnya, kebijakan dirancang dengan tujuan tertentu sebelum diimplementasikan. Implementasi adalah proses mengkomunikasikan kebijakan kepada masyarakat umum agar dapat memberikan dampak yang diinginkan.

Dalam Bangsu (Bangsu, 2022) Setelah dikeluarkannya arahan yang sah, implementasi kebijakan terjadi. Oleh karena itu, penerapan kebijakan harus menghubungkan tujuan kebijakan dan pencapaiannya dengan hasil operasional pemerintah. Hal ini mencakup masukan manajerial untuk menghasilkan keluaran bagi masyarakat..

Sementara itu, menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood (Esem, 2019). Menerapkan kebijakan secara efektif memerlukan kemampuan untuk mengevaluasi keadaan sebelum bertindak dengan sukses. Sebuah proses diskusi praktis yang dikenal sebagai implementasi digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk menentukan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan dengan cara

ini. Perubahan kebijakan yang merugikan tujuan program sebagaimana dimaksud. Pelaksana kebijakan bertugas membangun jaringan yang memudahkan lembaga pemerintah, serta pihak berkepentingan lainnya, dalam melaksanakan tujuan kebijakan publik.

Menurut pendapat para ahli tersebut, pelaksanaan diartikan sebagai suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini mencakup peraturan-peraturan yang diterapkan dalam pengambilan keputusan politik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga menghasilkan terwujudnya rencana-rencana yang matang dalam tindakan baik pada tingkat politik maupun individu. Sebagai sebuah kelompok.

Van Meter dan Van Horn menciptakan model metode implementasi kebijakan yang dikenal dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975). Tujuan utama penerapan proses yang menggabungkan abstraksi kebijakan adalah untuk mencapai kinerja implementasi kebijakan yang tinggi, yang didasarkan pada interaksi berbagai variabel. Model ini mengasumsikan bahwa kinerja kebijakan publik, pelaksana, dan keputusan politik semuanya mengikuti garis lurus terhadap implementasi kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno, ada enam faktor yang mempengaruhi bagaimana kebijakan diimplementasikan (2007: 158). Elemen-elemen ini tercantum dalam urutan berikut.:

A. Ukuran dan tujuan kebijakan

Prosedur dan tujuan kebijakan diperlukan untuk menjamin bahwa program dilaksanakan sesuai dengan rencana awal. Tujuan penetapan keputusan kebijakan

umum seperti undang-undang dan peraturan adalah untuk menetapkan standar yang adil dan praktis dalam mendistribusikan kinerja program (Jenkins, 2003). Keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat dinilai jika tujuan dan ruang lingkungannya masuk akal dalam konteks sosiokultural di mana kebijakan tersebut diterapkan. Ketika tujuan atau langkah-langkah kebijakan publik terlalu ideal untuk dipraktikkan di tingkat daerah, maka akan sangat sulit untuk mencapai kebijakan tersebut sampai pada titik di mana kebijakan tersebut dianggap efektif. Sub-indikator kejelasan tujuan dan implementasi standar serta pencapaiannya dapat digunakan untuk memahami tujuan dan ruang lingkup kebijakan (Rahayu, 2019).

Pencapaian standar dan pemenuhan target implementasi merupakan dua konsep kunci dalam proses penerapan sistem kebijakan. Pencapaian Standar menunjukkan apakah kebijakan tersebut mematuhi norma dan spesifikasi yang diterima, sedangkan Target Implementasi menetapkan tujuan yang harus dicapai selama tahap implementasi (Wicaksono & Susilowati, 2019).

Hasil yang diharapkan dari proses implementasi dikenal sebagai tujuan implementasi. Untuk menjamin bahwa proses implementasi akan mencapai tujuan yang dimaksudkan, suatu organisasi atau bisnis menetapkan target implementasi. Tujuan implementasi mungkin mempertimbangkan beberapa elemen seperti waktu, uang, kualitas, dan lain-lain. Biasanya ada hubungan antara keduanya karena pemenuhan Target Implementasi pada tahap implementasi memerlukan pemenuhan Standar Pencapaian. Apabila Standar Pencapaian tidak terpenuhi, maka Target Implementasi tidak dapat dipenuhi secara optimal. Meskipun demikian, jika

Standar Pencapaian terpenuhi, pencapaian Target Implementasi akan lebih mudah dan efisien dilakukan (Adiwinarnil, 2020)

B. Sumber-sumber kebijakan

Agar dapat dilaksanakan, sumber daya yang akan membantu pelaksanaannya juga harus tersedia. Sumber daya ini dapat mencakup uang tunai atau disparitas lainnya yang membantu memastikan kinerja yang efektif. Materi Kebijakan Agustino mengutip pernyataan Van Metter dan Van Horn bahwa sumber daya kebijakan yang mencakup waktu, uang, dan pemanfaatan sumber daya manusia menentukan keberhasilan suatu kebijakan diimplementasikan (Meter dan Horn dalam Agustino, 2006: 142). Sumber daya yang dialokasikan untuk kebijakan pemerintah mempunyai dampak yang signifikan terhadap efektivitasnya. Karena sumber daya manusia menyediakan pendanaan yang dibutuhkan untuk memungkinkan pendanaan kebijakan, sumber daya manusia sangat penting dalam kemajuan dan pelaksanaan kebijakan karena sumber daya manusia menghilangkan hambatan yang menghambat proses pembuatan kebijakan (Mulyana Marbun, 2023)

Salah satu elemen terpenting dalam menentukan kinerja suatu bisnis adalah sumber daya manusianya, atau SDM. SDM mencirikan bakat, ketekunan, dan keteguhan hati karyawan suatu organisasi. SDM berdampak pada produktivitas, efisiensi, dan kinerja bisnis. Kualitas sumber daya manusia dipengaruhi oleh pengalaman, pendidikan, dan kompetensi tenaga kerja. Dunia usaha harus menghasilkan sumber daya manusia yang unggul jika ingin mencapai tujuannya.

Inisiatif pelatihan dan pengembangan juga diperlukan jika dunia usaha ingin

meningkatkan kualitas sumber daya manusianya (Permatasari, 2020).

Keuangan adalah salah satu sumber daya perusahaan yang paling signifikan. Sumber daya keuangan mencakup uang tunai, modal, dan pinjaman untuk bisnis. Sumber daya keuangan suatu perusahaan berdampak pada pemeliharaan dan keuangannya. Waktu, atau kapasitas untuk mengelola waktu dengan sukses, adalah salah satu sumber daya paling penting bagi perusahaan.

C. Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana

Efektivitas suatu kebijakan dapat dinilai dengan memeriksa susunan atau ciri-ciri organisasi yang melaksanakan kebijakan tersebut. Hal ini penting karena kualitas dan kelayakan organisasi atau lembaga yang menjalankan kebijakan akan berdampak besar terhadap seberapa baik kebijakan tersebut diterapkan (Prilian, 2022). Subarsono menekankan bahwa kredibilitas seorang aktor seperti tingkat pendidikan, pengalaman di industri, tingkat kompetensi, dan karakter moral berpengaruh pada seberapa baik suatu kebijakan (Subarsono, 2006: 7). Karakter lembaga pelaksana dapat diketahui dengan memeriksa norma atau pedoman kebijakan pelaksanaan, pola hubungan yang sudah ada, dan sub-indikator struktur kinerja.

Pada kenyataannya, struktur struktural adalah kerangka organisasi yang digunakan oleh pemerintah, lembaga, dan organisasi lain untuk mengelola dan mengawasi aktivitas kerja. Tiga komponen utama yang digunakan untuk melaksanakan kerangka birokrasi adalah sebagai berikut: Struktur Organisasi. Struktur organisasi menetapkan hubungan antara posisi dan pembagian kerja. Unit

kerja, departemen, dan tingkatan manajemen membentuk struktur organisasi. Prosedur operasional yang harus diikuti untuk menyelesaikan tugas organisasi ditetapkan dalam prosedur operasional. (Andriani, 2022). Norma atau aturan pelaksanaan kebijakan adalah aturan yang dirancang untuk mengatur bagaimana kebijakan dijalankan. Peraturan akan diterapkan secara akurat, konsisten, dan teratur dengan mematuhi persyaratan tersebut. Untuk menegakkan norma, jenis kebijakan berikut dapat diterapkan: Pedoman. Pemerintah telah menetapkan aturan untuk mengatur bagaimana kebijakan dijalankan.

Teknik yang sering diperhatikan dan dijadikan pola dalam hubungan interpersonal dikenal dengan pola hubungan kekinian. Pola hubungan antar pasangan antara lain berkaitan dengan komunikasi, perbedaan, perlakuan, dan perasaan. Pola hubungan ini dapat berdampak pada kemitraan secara keseluruhan dan mengungkap sehat atau tidaknya hubungan tersebut (Adelian, Pujaastawa, & Sudiarna, 2021).

D. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Koordinasi pelaksanaan yang berkesinambungan sangat terbantu dengan adanya komunikasi. Sistem dan proses kelembagaan yang mengontrol pola komunikasi organisasi dari otoritas tertinggi hingga otoritas terendah diperlukan untuk implementasi kebijakan. Hogwood dan Gunn menyatakan bahwa Wahab mengatakan:

“Koordinasi tidak hanya sekedar mengkomunikasikan informasi atau menyiapkan struktur tata kelola yang tepat, namun juga mengenai isu-isu yang lebih mendasar: praktik implementasi kebijakan”. (Hogwood dan Gunn dalam Wahab, 2004:77)

Van Meter dan Van Horn menyebutkan beberapa elemen komunikasi politik, seperti: Kejelasan, konsistensi, dan penyediaan informasi politik kepada publik adalah aspek-aspeknya. Sebaliknya, semakin sedikit kesalahan yang terjadi dalam proses implementasi, semakin baik komunikasi dan koordinasi antar pihak yang terlibat. Subindikator komunikasi, kejelasan informasi, dan konsistensi dapat digunakan untuk menilai komunikasi antar organisasi dalam konteks pelaksanaan kegiatan.

Proses transformasi data atau informasi dari satu format ke format lainnya disebut transformasi informasi. Transformasi data merupakan komponen krusial dalam ranah teknologi informasi dan komputer dalam sejumlah skenario, termasuk pemrosesan data, komunikasi, dan analisis. Proses mentransformasikan, memodifikasi, atau mengubah data atau informasi dari satu format ke format lainnya disebut transformasi informasi dalam konteks komputasi dan teknologi informasi (Sari, 2023).

Informasi yang jelas mudah dibaca, tidak menimbulkan kesalahpahaman atau ambiguitas, dan mudah dipahami. Informasi harus dikomunikasikan secara jelas dan tepat agar pihak yang menerimanya dapat memahaminya dengan cepat dan mudah (Hisbullah & Nurhidayati, 2021). Ukuran kejelasan informasi adalah kemudahan pemahaman, keterbacaan, dan tidak adanya keraguan atau ruang untuksalah tafsir. Informasi harus disajikan dengan jelas dan tepat agar pihak yang

menerimanya dapat memahaminya dengan cepat dan mudah. Hal ini penting karena, khususnya dalam dunia bisnis, penerima akan lebih mudah mengambil keputusan jika informasinya dapat dimengerti dan lugas. Selain menjamin pemahaman komprehensif dan pengungkapan pesan oleh semua pihak yang terlibat, komunikasi yang tidak ambigu juga mengurangi risiko kesalahpahaman dan perselisihan selama pertukaran ide.

Sebaliknya, konsistensi informasi mengacu pada keadaan di mana komunikasi dikirim secara konsisten dalam konteks yang sama, tanpa adanya variasi atau kontradiksi yang jelas. Hal ini berkaitan dengan bagaimana informasi dikomunikasikan melalui berbagai saluran dan apakah informasi tersebut relevan, harmonis, dan sesuai (Tambunan & Rahmawati, 2023).

E. Sikap para pelaksana (*Disposition*)

Menurut Widodo yang mengutip Van Meter dan Van Horn, pelaksana bertanggung jawab atas norma, pola penghubung, dan struktur birokrasi yang ada dalam birokrasi (Meter dan Horn dalam Subarsono, 2006: 101). Pelaksana kebijakan perlu mempunyai sikap disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini dilakukan karena mempengaruhi efektivitas kebijakan yang dijalankan; setiap lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan hal tersebut perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakannya sendiri, berdasarkan rencana yang sudah ada sebelumnya. Untuk mengetahui sikap pelaksana kebijakan, dapat dilihat pada sub-indikator pengetahuan kebijakan, intensitas kebijakan, dan daya tanggap kebijakan (Rosita, 2022).

Kognisi, atau pemahaman terhadap kebijakan, adalah kapasitas untuk mengumpulkan, terlibat, dan mengintegrasikan data dari beragam sumber untuk menghasilkan pengetahuan, wawasan, dan kritik terhadap kebijakan. Hal ini memerlukan metode seperti analisis, sintesis, dan penilaian yang memungkinkan individu memilih solusi yang masuk akal dan efektif terhadap permasalahan saat ini. Keterampilan kognitif ini juga memungkinkan pemahaman dan karakterisasi bagaimana kebijakan berdampak pada masalah dan pemanfaatan sumber daya (Hidayah, Hendrijanto, Poerwanti, Santoso, & Puspito, 2023).

Intensitas respons mengacu pada jenis dan tingkat pemahaman dan verifikasi yang dialami penerima pesan, informasi, atau produk. Dalam komunikasi, intensitas respons menggambarkan jenis dan sejauh mana perasaan, pemahaman, dan respons penerima terhadap suatu pesan. Intensitas reaksinya bisa negatif, seperti rasa jengkel, mengumbar, dan kecewa, atau positif, seperti kesenangan, kegembiraan, dan minat. Intensitas respon tergantung pada sejumlah elemen, termasuk kualitas dan relevansi pesan, kemampuan komunikasi dan interaksi pengirim dan penerima, dan seberapa cocok pesan tersebut dengan kebutuhan dan harapan penerima (Pratama & Bataha, 2024)

F. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Agustino menyatakan bahwa sejauh mana lingkungan eksternal politik, sosial, dan ekonomi mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan publik yang dilaksanakan ditentukan oleh efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut (Meter dan Horn dalam Agustino, 2006: 144).

Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi semuanya berdampak pada seberapa baik suatu implementasi berjalan. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dapat dilihat melalui subindikator karakteristik peserta, opini masyarakat terhadap lingkungan hidup, dan dukungan elit politik terhadap implementasi kebijakan (Permatasari, 2020)

Dalam kerangka suatu program atau kegiatan, kualitas unik peserta menunjukkan bagaimana mereka akan berpartisipasi, berkontribusi, dan mencapai tujuan kegiatan. Bakat, pengalaman, minat, motivasi, persepsi, dan kompetensi, antara lain, dapat berdampak pada kualitas peserta. Ketahanan setiap orang, kapasitas untuk melaksanakan tanggung jawabnya, dan kapasitas untuk menghasilkan hasil dalam aktivitasnya semuanya dipengaruhi oleh kemampuannya (Ernawaty & Napirah, 2023). Sebaliknya, pengalaman menunjukkan berapa banyak waktu dan kesempatan yang dimiliki seseorang untuk berpartisipasi dalam aktivitas terkait. Di sisi lain, rasa ingin tahu menunjukkan tingkat minat dan kemahiran seseorang terhadap tugas-tugas yang menarik perhatiannya. Di sisi lain, motivasi menunjukkan tingkat penolakan dan keinginan yang ditunjukkan oleh peserta dalam menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan dalam kegiatan (Fadli, 2021). Persepsi, sebaliknya, menunjukkan bagaimana partisipan memandang dan memahami lingkungan di mana aktivitas tersebut berlangsung. Di sisi lain, kompetensi menunjukkan bakat dan kemampuan peserta dalam menyelesaikan tugas dan menghasilkan hasil dalam kegiatan. Ini semua adalah variabel dinamis yang dapat berubah sebagai respons terhadap peristiwa dan keputusan yang dibuat.

2.1.2 unsur-unsur Implementasi Kebijakan

Dalam Tachjan (2006:28) menjelaskan tentang indikator dari implementasi kebijakan yang mutlak dan harus ada, yaitu:

1. Unsur pelaksana

Pelaksana kebijakan menurut Dimock dan Dimock dalam Tachjan (2006:28) adalah individu yang melaksanakan tugas implementasi kebijakan, seperti menetapkan tujuan dan sasaran organisasi serta mengkaji proses pembentukan kebijakan dan strategi organisasi. Hal ini mencakup pengorganisasian, perencanaan, penggerakan masyarakat, pelaksanaan operasional, pengawasan dan evaluasi. Proses menentukan apa yang harus dicapai untuk suatu proyek, aktivitas, atau program dikenal sebagai penetapan tujuan. Sasaran adalah hasil atau konsekuensi yang diantisipasi, bukan target, yang bisa berupa benda, orang, kelompok, organisasi, atau komunitas. Dengan menentukan tujuan dan sasaran, peserta dalam acara ini dapat menentukan apa yang harus dicapai dan oleh siapa, sehingga memungkinkan mereka mengembangkan rencana tindakan yang efektif (Laksa, 2022).

2. Adanya Program Yang Dilaksanakan

Kebijakan publik tidak memiliki bobot tindakan aktual yang dilakukan melalui berbagai inisiatif atau aktivitas. Sebuah program atau kegiatan adalah strategi yang dipikirkan dengan matang yang menggabungkan semua sumber daya yang digunakan ke dalam satu unit yang kohesif dan menggambarkannya. Dalam konteks program atau kegiatan, pengorganisasian adalah kegiatan mengendalikan dan mengatur karakteristik peserta guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Memilih dan menciptakan strategi, merencanakan tugas, menentukan kebutuhan dan standar, memilih dan menciptakan fasilitas dan peralatan, menetapkan struktur organisasi, memantau, dan menilai adalah bagian dari pengorganisasian. Selain itu, meningkatkan kinerja, mencapai tujuan, meningkatkan kepuasan peserta, meningkatkan kontinuitas dan akurasi peserta, meningkatkan keselamatan dan kesehatan peserta, meningkatkan kesadaran dan kompetensi peserta, meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, dan meningkatkan hubungan peserta adalah semua tujuan pengorganisasian (Tambunan & Rahmawati, 2023).

3. Target Group Atau Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran adalah sekelompok individu atau organisasi dalam masyarakat yang akan terkena dampak kebijakan melalui penyediaan barang atau jasa. Orang atau kelompok orang yang perilaku dan aksesnya terhadap barang dan jasa akan terkena dampak kebijakan tersebut. Pihak yang akan menderita akibat tertentu sebagai akibat dari pengaruh kebijakan terhadap perilaku adalah pihak yang memperoleh keuntungan dalam memperoleh produk atau jasa. Kebutuhan, kesadaran, keterampilan, ketahanan, dan kapasitas untuk menangani dan memanfaatkan barang atau jasa semuanya dapat berdampak pada kualitas penerimanya (Fajar, 2022).

2.1.3 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Peluang bahwa suatu kebijakan tidak akan berhasil diterapkan tidak akan pernah hilang. Tentu saja, penerapan implementasi kegagalan dalam hal ini paling baik dilakukan dengan mempertimbangkan dampak nyata yang disaksikan oleh

para pengambil keputusan. Hal ini menimbulkan beberapa alasan mengapa implementasi gagal. Bambang Sunggono (1994) mencatat sejumlah hambatan implementasi kebijakan, seperti:

1. Isi kebijakan

Pertama, isi kebijakan masih ambigu, yang berarti bahwa pendekatan dan pelaksanaannya mendapat prioritas utama, tujuan tidak didefinisikan secara memadai, atau kebijakan program tidak ada atau terlalu luas. Akibatnya, eksekusi kebijakan tersebut tidak berhasil. Alasan kedua adalah tidak ada persyaratan kebijakan internal atau eksternal yang harus diikuti. Ketiga, ada kemungkinan kebijakan yang akan diterapkan juga mempunyai kelemahan yang signifikan.

Keempat, ketidakmampuan suatu kebijakan publik untuk diimplementasikan mungkin juga disebabkan oleh kurangnya sumber daya tambahan, termasuk sumber daya yang bersifat finansial, waktu, dan sumber daya manusia (Sarmini et al., 2023) Sarana dan prasarana adalah sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek atau kegiatan. Ada dua jenis infrastruktur dan fasilitas: bentuk material seperti ruang, mesin, dan transportasi, dan bentuk lunak seperti jaringan informasi dan komunikasi. Sarana dan prasarana memainkan fungsi penting dalam membantu dan memungkinkan peserta kegiatan mencapai hasil yang diinginkan (Wahab, 2021).

2. Informasi Implementasi

Ketika suatu kebijakan publik diimplementasikan, diasumsikan bahwa pemegang peran yang berkepentingan langsung memiliki informasi yang diperlukan untuk mengajukan permohonan dengan tepat. Misalnya, masalah

komunikasi menghalangi keberadaan informasi ini.

Informasi yang jelas, ringkas, mudah dibaca, dipahami, dan tidak memerlukan banyak penjelasan atau kosa kata yang rumit. Informasi harus disajikan dengan jelas dan tepat agar pihak yang menerimanya dapat memahaminya dengan cepat dan mudah. Kemudahan pemahaman, keterbacaan, dan kurangnya ambiguitas atau potensi interpretasi yang berbeda-beda merupakan indikator kejelasan informasi (Nuryani, R., Dolifah, D., Sopiah, P., Faozi, A., & Purnama, 2023).

3. Dukungan Pelaksana

Apabila kebijakan publik tidak mendapat dukungan yang cukup, maka kebijakan tersebut akan sangat sulit diimplementasikan. Dalam konteks ini, dukungan politik mengacu pada ciri-ciri individu yang menunjukkan tingkat dukungannya terhadap kandidat politik, partai politik, atau ideologi politik tertentu. Banyak karakteristik, termasuk kepemilikan, pendidikan, kesadaran politik, etnis, lokalitas, agama, dan perspektif terhadap isu-isu lokal, dapat mempengaruhi latar belakang politik seseorang. Dukungan teknis harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing peserta serta faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi, kontribusi, dan hasil akhir mereka selama kegiatan. Kemungkinan pertukaran. Aspek sebaran potensi antar aktor yang terlibat dalam proses implementasi juga ditentukan oleh alasan kegagalan implementasi kebijakan tersebut. Hal ini berkaitan dengan kewenangan organisasi pelaksana dan pembagian kerja (Adelian et al., 2021).

4. Pembagian potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Mekanisme kerja adalah proses fizikal dan teknis melalui manfaat interaksi antara bagian-bagian dalam sebuah sistem mekanik. Dalam hal teknologi, mekanisme kerja adalah cara bagian-bagian dalam sebuah mesin, alat, atau perangkat bekerja dan mencapai tujuan yang diinginkan. Mekanisme kerja terdiri dari serangkaian gaya, gerak, dan interaksi antara komponen yang memungkinkan suatu sistem mekanik untuk melaksanakan fungsi yang diperlukan. kompeten dalam bidangnya mengacu pada kemampuan atau keahlian seseorang dalam suatu bidang tertentu. Seorang individu dikatakan kompeten dalam bidangnya jika ia memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai untuk berhasil dan efektif dalam pekerjaan atau aktivitas yang berkaitan dengan bidang tersebut. Ketika seseorang dianggap kompeten dalam bidangnya, ini mencerminkan kemampuannya untuk memberikan kontribusi yang berarti dan berkualitas dalam pekerjaan atau aktivitas yang terkait dengan bidang tersebut. Kompetensi ini dapat terus dikembangkan melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja yang terus-menerus.

2.1.4 Konsep Rehabilitasi

Re yang artinya kembali dan habilitasi yang artinya kapasitas adalah dua istilah yang membentuk kata rehabilitasi. “Rehabilitasi” berarti proses mendapatkan kembali kapasitas kinerja individu. Meningkatkan kesejahteraan fisik, emosional, sosial, profesional, dan finansial adalah tujuan rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan suatu proses berfungsinya kembali dan pengembangan yang memungkinkan seseorang dapat berfungsi dengan baik dalam konteks sosial, sesuai Peraturan Kementerian kesehatan.

Menurut Lehinsie dan Canbell yang dikutip Serdar (2019:22), rehabilitasi sosial bertujuan untuk mempersiapkan klien secara fisik, kognitif, dan sosial agar dapat hidup sesuai dengan kemampuannya mencakup seluruh aktivitas fisik, penyesuaian psikologis, dan modifikasi maksimal. Di sinilah lokasi penyelenggara:

1. Mencapai perbaikan adaptasi bagi pelanggan hingga pulih

Memulihkan kepercayaan diri dan harga diri mengacu pada proses mendapatkan kembali kepercayaan dan harga diri sebelumnya. Rasa percaya diri merupakan perasaan sejahtera yang bersumber dari pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki seseorang. Nilai-nilai orang tentang dirinya, yang dikenal sebagai harga diri, dapat berbeda-beda tergantung pada pengalaman dan keadaannya.

2. Berikan kemampuan yang mereka perlukan untuk melakukan yang terbaik.

Memperoleh dorongan dan kemampuan untuk menjalankan peran sosialnya secara efisien. Seseorang dapat memperoleh kembali aspirasi dan bakatnya serta mampu melakukan aktivitas sosial sehari-hari. Pasien dengan penyakit mental seperti depresi, gangguan bipolar, atau cedera otak traumatis dapat meningkatkan

keterampilan sosial mereka dan menghilangkan gejala-gejala yang mengganggu melalui proses “memulihkan kemauan dan kemampuan”. Selama proses penyembuhan ini, orang akan menemukan mekanisme penanggulangan yang efektif terhadap stres, guncangan, dan tantangan sosial. Dengan memulihkan kemauan dan kemampuan mereka, masyarakat dapat melanjutkan tanggung jawab sosial mereka dan menemukan kepuasan dalam hidup mereka.

3. Penyesuaian diri dilingkungan

merasa bertanggung jawab terhadap masa depannya sendiri serta masa depan lingkungan sosial, keluarga, dan masyarakatnya. Emosi yang memicu tindakan dan gagasan yang menunjukkan pemikiran dan perilaku yang terfokus pada masa depan adalah rasa tanggung jawab terhadap masa depan diri sendiri, keluarga, masyarakat, atau lingkungan sosial. Mereka yang memiliki rasa tanggung jawab yang kuat akan mengambil kepemimpinan dan menyadari bahwa pilihan yang mereka ambil saat ini akan mempengaruhi bagaimana mereka, keluarga mereka, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya akan berfungsi di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa memiliki rasa tanggung jawab merupakan emosi yang memotivasi seseorang untuk mengambil keputusan dan bertindak dengan cara yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, atau lingkungan sosialnya dalam jangka panjang.

2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Reno Affrian, (2019)	Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kabupaten Hulu Sungai Utara	Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis Kualitatif	Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa orang dengan penyakit jiwa mempunyai akses terhadap perawatan, terapi dan rehabilitasi yang mereka perlukan untuk pulih sepenuhnya. Selain itu, terdapat kemajuan yang tidak konsisten dalam mewujudkan hak-hak individu dengan penyakit mental. Hal ini terlihat dari adanya permasalahan di bidang sosial, politik dan ekonomi serta kurangnya dana yang dibutuhkan untuk memberikan layanan kesehatan jiwa. Sumber daya lingkungan, sosial, politik, dan ekonomi semuanya berdampak pada penerapan hak-hak penderita penyakit mental di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2.	Diana Rahmawati (2022)	Peran Dinas Sosial Sosial Dalam Rehabilitasi	Penulis menggunakan metode	Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial cukup efektif dalam

		Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Di Jombang	penelitian kualitatif untuk penelitian ini.	mendampingi setiap individu ODGJ. Selain itu, Dinsos juga menyediakan kelas kecerdasan emosional dan rehabilitasi fisik, dan bimbingan spiritual kepada korban ODGJ di Kabupaten Jombang. Infrastruktur yang belum memadai, minimnya keterlibatan masyarakat, minimnya sumber daya manusia, dan terbatasnya anggaran menjadi beberapa kesulitan dalam mempertahankan ODGJ. Akibatnya, kesembuhan ODGJ belum mencapai potensi maksimal. Dinas Sosial menghadapi kesulitan tambahan akibat keterbatasan keuangan.
3.	Aris Tristante, Yunilisiah, Tamrin Bangsu, (2022)	Implementasi Kebijakan Pelayanan Masalah Penanganan Gangguan Jiwa Di Dinsos P2kbp3a Kota Padang Panjang	Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan Deskriptif analitik.	Kesimpulan penelitian menunjukkan efektivitas kampanye komunikasi DINSOS P2KBP3A Kota Padang Panjang. Untuk pelayanan sosial selain panti asuhan, sumber daya manusianya masih kurang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Semua orang bersikap positif terhadap karakternya dan menerimanya. Perlu segera dibangun karena Dinas Sosial DINSOS P2KBP3A Kota Padang Panjang saat ini belum memiliki SOP untuk mengatasi penyakit jiwa. Selain itu, untuk

				<p>mengoptimalkan pelayanan, organisasi ini perlu meningkatkan anggaran dan sumber daya manusia. Berdasarkan penelitian ini, upaya komunikasi DINSOS P2KBP3A Kota Padang Panjang terbilang berhasil. Dari segi sumber daya manusia, penyediaan layanan sosial di luar panti asuhan oleh lembaga ini masih buruk baik secara kualitas maupun kuantitas karena adanya DINSOS. Selain itu, kelompok-kelompok ini perlu meningkatkan pendanaan dan staf untuk memaksimalkan layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan komunikasi DINSOS P2KBP3A Kota Padang Panjang dinilai berhasil. Jumlah dan kualitas layanan sosial yang diberikan DINSOS P2KBP3A Kota Padang Panjang di luar panti asuhan masih belum mencukupi karena kurangnya pekerja sosial yang berkualitas dalam sumber daya manusianya. Dalam hal temperamen, orang menerima atau menolak penolakan. Meskipun demikian, perspektif positif dari para pelaksana memerlukan infrastruktur dan sumber daya yang memadai.</p>
--	--	--	--	---

	<p>4. Arin Wahyuni, Rima Vien Permata Hartanto, Muhammad Hendri Nuryadi, (2021)</p>	<p>Rehabilitasi Sosial bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Telantar melalui Program Griya Peduli Palang Merah Indonesia Kota Surakarta</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, pengumpulan data melalui observasi, studi dokumentasi, dan wawancara.</p>	<p>Temuan penelitian menunjukkan bahwa ada lima proses yang terlibat dalam rehabilitasi sosial: Menemukan kelompok remaja luar (ODGJ) di jalanan merupakan langkah awal dalam proses penilaian, yang juga melibatkan gejala diagnostik objektif. Memastikan ODGJ tertentu kooperatif dan tidak kooperatif merupakan bagian dari persiapan intervensi. Kebutuhan dasar seperti pakaian, perumahan, peralatan, perlengkapan medis, dan bantuan sosial, spiritual, dan mental termasuk dalam intervensi ini; Perolehan kemampuan sehari-hari terjadi secara bertahap; Layanan utilitas untuk nomor identitas. Semula ODGJ yang ditemui di rumah atau bersama anggota keluarga merupakan langkah terakhir yang disebut resosialisasi. Terdapat kesulitan dalam melaksanakan rehabilitasi sosial, seperti terbengkalainya ODGJ yang baru mengikuti program karena terbatasnya akses mereka terhadap layanan kesehatan.</p>
--	---	--	--	---

5.	Reza Darmawan, Ignatius Adiwidjaja (2019)	Efektivitas Kebijakan Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pmks Khusus Odgk Terlarang Di Kota Batu	Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif	Salah satu kesimpulan utama penelitian ini adalah tingginya persentase individu dengan gangguan jiwa yang ditemukan ditelantarkan di kota-kota besar. Menurut UU/18/2014 tentang Kesehatan Jiwa Pasal 80, "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlarang, tidak mempunyai tempat tinggal, terjamin keselamatan dirinya dan/atau orang lain dan/atau mengganggu transportasi dan/atau keamanan masyarakat," ujarnya. Peneliti merasakan langsung kebijakan bakti sosial ini pada saat melakukan prosedur observasi dan wawancara.
6.	Andriani (2022)	Implementasi Terapi Psikososial Pada Residen Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Akibat Napza Di Panti Rehabilitasi Kunci Yogyakarta	Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk membantu pemulihan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), pekerja sosial dan konselor di Panti Rehabilitasi Yogyakarta memberikan terapi psikososial. Berbagai inisiatif digunakan untuk melakukan hal ini, seperti sering mengadakan pertemuan pagi dengan warga,

				menawarkan sumber daya psikoedukasi, mendorong refleksi dan berbagi pengalaman, konseling individu, dan terapi okupasi.
7.	Chonmanan Khanthavudh (2023)	Implementation and evaluation of recovery-oriented practices interventions for people with mental illness in Asia	A systematic integrative review approach is used to include qualitative, quantitative, mixed methods and reviews study, to gain a comprehensive understanding of recovery-oriented practice interventions in Asia.	Recovery is a process that provides people with the tools they need to take charge of their lives and establish meaningful and purposeful lives, regardless of whether mental health problems return. Recovery-oriented approaches have become popular during the last 20 years, particularly in Anglophone nations. Asia is also heading toward mental health care that is focused on healing. It is unclear how recovery-oriented therapies with a Western background should be applied and evaluated in an Asian setting.

Menurut penelitian (Affrian, 2019) Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis Kualitatif. Berdasarkan kesimpulan studi tersebut, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan orang-orang dengan penyakit mental memiliki akses terhadap perawatan, terapi, dan rehabilitasi yang mereka perlukan agar dapat pulih sepenuhnya. Selain itu, terdapat kemajuan yang tidak konsisten dalam realisasi hak-

hak individu dengan penyakit mental. Hal ini terlihat dari adanya permasalahan di bidang sosial, politik, dan ekonomi selain kurangnya dana yang dibutuhkan untuk menyediakan layanan kesehatan mental. Sumber daya lingkungan, sosial, politik, dan ekonomi semuanya mempengaruhi seberapa baik hak-hak penderita penyakit jiwa diterapkan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Menurut (Bangsu, 2022) Penerapan Kebijakan Pelayanan Dinas Sosial Penanggulangan Penyakit Jiwa Kota Padang Panjang, P2kbp3a. Metode kualitatif yang dikombinasikan dengan pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk melakukan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial cukup efektif dalam membantu individu penderita ODGJ. Selain itu, Dinas Sosial juga memberikan pembinaan keterampilan, pengobatan fisik, dan bimbingan spiritual kepada korban ODGJ di Kabupaten Jombang. Infrastruktur yang belum memadai, minimnya keterlibatan masyarakat, minimnya sumber daya manusia, dan terbatasnya anggaran menjadi beberapa kesulitan dalam mempertahankan ODGJ. Akibatnya, kesembuhan ODGJ belum mencapai potensi maksimal. Dinas Sosial menghadapi kesulitan tambahan akibat keterbatasan keuangan.

Menurut (Wahyuni et al., 2021) Rehabilitasi Sosial bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Telantar melalui Program Griya Peduli Palang Merah Indonesia Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, Lokasi di Kota Surakarta. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi sosial dilakukan melalui lima langkah: langkah pertama adalah mencari remaja luar kelompok (ODGJ) di jalanan; penilaian mencakup gejala diagnostik objektif;

persiapan intervensi meliputi memastikan ODGJ mana yang kooperatif dan mana yang tidak; intervensi tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, papan, peralatan, perbekalan kesehatan, serta bimbingan mental, spiritual, dan sosial; pengembangan keterampilan sehari-hari dilakukan secara bertahap; tersedia fasilitas pembangkitan nomor induk kependudukan; Pemula ODGJ yang ditemui di rumah atau bersama anggota keluarga merupakan langkah terakhir yang disebut dengan resosialisasi. Terdapat kesulitan dalam melaksanakan rehabilitasi sosial, seperti terbengkalainya ODGJ yang baru mengikuti program karena terbatasnya akses mereka terhadap layanan kesehatan.

Menurut (Darmawan & Adiwidjaja, 2019) Efektivitas Kebijakan Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pmks Khusus Odgj Terlantar Di Kota Batu. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Salah satu kesimpulan utama penelitian ini adalah tingginya persentase individu dengan gangguan jiwa yang ditemukan terlantar di kota-kota besar. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Pasal 80, “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar, tidak mempunyai tempat tinggal, terjamin keselamatan dirinya dan/atau orang lain dan/atau mengganggu transportasi dan/atau keamanan masyarakat,” ujarnya. Peneliti merasakan langsung kebijakan bakti sosial ini pada saat melakukan prosedur observasi dan wawancara.

Menurut (Andriani, 2022) Implementasi Terapi Psikososial Pada Residen Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Akibat Napza Di Panti Rehabilitasi Kunci Yogyakarta. Penulis tertarik dalam memilih serta menggunakan penelitian

deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk membantu pemulihan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), pekerja sosial dan konselor di Panti Rehabilitasi Yogyakarta memberikan terapi psikososial. Berbagai inisiatif digunakan untuk melakukan hal ini, seperti sering mengadakan pertemuan pagi dengan warga, menawarkan sumber daya psikoedukasi, mendorong refleksi dan berbagi pengalaman, konseling individu, dan terapi okupasi.

Menurut (Etruw et al., 2023) Implementation and assessment of practice-based and recovery-oriented interventions across Asia for mental health patients. To gain a comprehensive understanding of recovery-oriented practice interventions in Asia, a systematic integrative review strategy consisting of qualitative, quantitative, mixed methods, and review studies was used. Recovery is a process that gives people the tools they need to take control of their lives and build lives of meaning and meaning, whether mental health problems resurface or not. Over the past 20 years, recovery-oriented techniques have been widely adopted, particularly in Anglophone nations. Asia is likewise shifting toward recovery-oriented approaches to mental health treatment. The application and assessment of recovery-oriented therapies that originated in the West in the Asian context are not well understood.

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

1. ODGJ sering mendapat stigma buruk dan perlakuan tidak manusiawi
2. Gangguan mental dapat memberikan dampak buruk dan meningkatkan resiko kemiskinan.
3. Pemerintah kurang memperhatikan ODGJ yang ada di kota Batam, sehingga penderita gangguan jiwa di kota Batam sekarang ini kian meningkat.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
PERDA Nomor 4 Tahun 2017

Implementasi program Rehabilitasi ODGJ
Di kota Batam

